**PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DALAM REVITALISASI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**DI INDONESIA**

**Abdul Wahab**1\*

1Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam

Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Jl. Adhyaksa No. 21 Banjarmasin

*\*Alamat Email:* [*11abd.wahab@gmail.com*](mailto:11abd.wahab@gmail.com),

**ABSTRACT -** *The financial sector has a strategic role to support the country's economic activities with Islamic Financial Institutions (LKS). While Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have an important position in Indonesia's financial sustainability. Financial institutions that support in an effort to encourage economic sector growth through UMKM in terms of capital. The government took over the real sector, by saving UMKM loans through banking to sharia conversion, the real sector will automatically be saved. By ensuring the role of UMKM as financial supporters, it is hoped that Indonesia's macroeconomic conditions will also be more resilient to global improvements in the coming years. Therefore, the purpose of this study is to determine the role of Islamic financial institutions on the growth of UMKM and strategic solutions in revitalizing economic development in Indonesia. This research is a qualitative research using descriptive and literature. The results of this study indicate that: 1) The role of Islamic financial institutions is very important as an intermediary; 2) Islamic financial institutions must provide convenience in accessing UMKM financial morning; 3) The Islamic financial system has been proven to be able to survive amid the financial crisis that once hit Indonesia; 4) Continuing cooperation between the government and intermediary institutions and the community in encouraging the growth and development of UMKM in the real sector; 5) UMKM are able to cope with those facing developing countries (NSB) if maximized properly.*

***Keywords: Development Economics; Islamic Financial Institutions; UMKM.***

**ABSTRAK** - **Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia**. Sektor lembaga keuangan memiliki peran yang strategis untuk penunjang kegiatan ekonomi suatu negara khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ([UMKM](https://www.wartaekonomi.co.id/tag5729/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.html)) memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan berperan dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor riil yaitu melalui UMKM dari segi permodalan. Pemerintah seharusnya berpihak ke sektor riil, dengan menyelamatkan pelaku UMKM melalui konversi perbankan ke syariah, sektor riilpun akan otomotis terselamatkan. Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dan solusi strategis dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Peran lembaga keuangan syariah sangat penting sebagai intermediari; 2) Lembaga keuangan syariah harus memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan pagi pelaku UMKM; 3) Sistem keuangan syariah telah teruji mampu bertahan ditengah krisis keuangan yang pernah melanda di Indonesia; 4) Kerjasama berkesinambungan pemerintah dengan lembaga intermediari serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil; 5) UMKM mampu mengatasi permasalahan yang dihadapai negara sedang berkembang (NSB) jika dimaksimalkan dengan baik.

**Kata Kunci:** Ekonomi Pembangunan; Lembaga Keuangan Syariah; UMKM.

**PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hariyono, 2010). Teori Negara Kesejahteraan *(Welfare State)* merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi *(Democracy),* Penegakan Hukum *(Rule of Law),* Perlindungan Hak Asasi Manusia *(The Human Right Protection),* Keadilan Sosial *(Social Justice)* dan Anti Diskriminasi *(Anti Discrimination)*. (Kresno, 2018)

Pemerintah Indonesia berusaha  melaksanakan dan mewujudkan Negara Kesejahteraan *(Welfare State)*  berdasarkan UUD 1945, melalui:  (i) Sistem jaminan sosial, sebagai *backbone* program kesejahteraan; (ii) Pemenuhan hak dasar warga Negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian; (iii) Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi serta penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi, (iv) Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai *agent of development* dan penyedia barang dan jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang Negara Kesejahteraan *(Welfare State)* untuk menegakkan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan ekonomi pembangunan (*development economics*) sering kali dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama, padahal dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda. “*economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is known as development economics*” (Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi Negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Sedangkan studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan). (Huda N. d., 2017)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan. Guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya. (Todaro, 2000)

Pada umumnya para ekonom memberikan pengertian yang sama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Para ekonom mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP. Dalam arti yang luas, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan di negara-negara maju. Sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di Negara Sedang Berkembang. (Ervani, 2011)

Pembagian negara menurut Bank Dunia (2011) berdasarkan Produk Nasional Bruto (PNB)/kapita per tahun :

1. Negara berpendapatan rendah: PNB/kapita < US$ 1,026.
2. Negara berpendapatan rendah hingga menengah: PNB/kapita antara US$ 1,026 dan US$ 4,036.
3. Negara berpendapatan menengah ke atas: PNB/kapita antara US$ 4,036 dan US$ 12,476.
4. Negara berpendapatan tinggi: PNB/kapita di atas US$ 12,476.

Hingga saat ini Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang (berpendapatan menengah ke atas) (PNB/kapita US$ 10,700) (Bank Dunia, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di nomor 16 tertinggi dunia (Bank Dunia, 2015). Bank Dunia juga mengategorikan Indonesia sebagai negara berkembang yang termasuk Negara Industri Baru(*Newly Industrialized County*).

Karakteristik Negara Industri Baru (Bank Dunia) adalah : (1) Kepemimpinan politik yang kuat dan stabil; (2) Adanya perubahan struktur dari pertanian ke negara industri; (3) Diakuinya ekonomi pasar terbuka dan perdagangan bebas; (4) Terdapat perusahaan-perusahaan nasional yang beroperasi di negara-negara lain; (5) Investasi modal yang signifikan dari negara asing; dan (6) Pertumbuhan pesat (sejak 1999 pertumbuhan Indonesia 4%-6%).

Bank Dunia mengategorikan hal-hal yang termasuk stimulan dan penghambat pertumbuhan negara untuk menuju fase berikutnya (i.e. dari berkembang ke maju): *Pertama,* Stimulan pertumbuhan: kebijakan perdagangan (UU Persaingan Usaha), investasi yang tinggi, memangkas gap modal manusia (i.e. gap pendidikan). *Kedua,* Penghambat pertumbuhan: epidemi penyakit, malnutrisi penduduk, gap pendidikan, instabilitas politik.

Adapun hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi (Mulyani) sebagai berikut: 1) Tingginya jumlah pengangguran; 2) Tingginya biaya produksi; 3) Keputusan pemerintah yang kurang tepat; 4) Bahan kebutuhan pokok masih langka; 5) Suku bunga perbankan terlalu tinggi dan/atau tingkat porsi bagi-hasil masih relatif kecil; 6) Nilai inflasi semakin tinggi; 7) Korupsi dan inefisiensi ekonomi; 8) Penyempitan infrastruktur; 9) Ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan iptek.

Dari permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang seperti negara Indonesia, dalam upaya menuju negara maju diperlukan kebijakan pemerintah salah satunya melalui peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Dari hasil peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai peningkatan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ([UMKM](https://www.wartaekonomi.co.id/tag5729/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.html)) terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari [Kementerian Koperasi dan UMKM](https://www.wartaekonomi.co.id/tag4279/kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-kemenkop-ukm.html), kontribusi UMKM pada [PDB](https://www.wartaekonomi.co.id/tag6661/produk-domestik-bruto-pdb.html) mencapai 60,34% pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. (Putra, 2016).

Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, dimana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM. Pemerintah idealnya harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat *creditworthiness* (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. *Creditworthiness* diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank. (Ekonomi, 2019) Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain bank syariah dianggap rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. (Rini, 2017)

Oleh sebab itu, pentingnya peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor riil yaitu melalui UMKM dari segi permodalan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah. Lembaga keuangan Syari’ah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil. Kekuatan perbankan syariah dalam menahan dampak krisis ekonomi global di Indonesia telah terbukti pada 1998. Krisis ekonomi kemudian terulang lagi pada 2008 yang lebih mengguncang pasar modal. Namun, krisis ekonomi terus terulang hingga pada 2011 dan telah menjangkau Amerika Serikat dan Eropa. Dengan berbagai pengalaman krisis itu, ekonomi syariah sudah terbukti bisa bertahan. Karenanya, konversi ke [ekonomi syariah](https://www.republika.co.id/tag/ekonomi-syariah) untuk perbankan bisa jadi solusi Indonesia keluar dari krisis ekonomi selanjutnya. Perekonomian di Indonesia, lanjutnya, ditopang oleh sektor riil. Karena itu, pemerintah seharusnya berpihak ke sektor riil dengan menyelamatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan konversi perbankan ke syariah, sektor riil ini akan otomotis terselamatkan. (Republika, 2011)

Sektor perbankan memiliki peran yang strategis untuk penunjang kegiatan ekonomi suatu negara. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, dan juga bank sebagai alur transmisi dari kebijakan sektor riil ke sektor moneter.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut terkait “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia”. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dan solusi strategis dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia.

**METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada peran Lembaga Keuangan Syariah dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi deskriptif ini juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi. (Narbuko, 2007)

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab peran LKS dalam meningkatkan dan mendorong UMKM yang bergerak pada pertumbuhan sektor riil sebagai upaya revitalilasi ekonomi pembangunan di Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian pustaka dengan metode analisis ide-ide pokok pemikiran peran LKS dalam memperkuat sektor riil melalui UMKM sebagai punggung perekonomian. Kemudian melakukan sinkronisasi hasil ide pemikiran dengan penerapannya dalam praktek modern. Kemudian menemukan sebuah konsep penting dalam menciptakan tatanan *good governance* negara berkembang menjadi negara maju dalam upaya menciptakan revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia.

**PEMBAHASAN**

Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme. (Chapra, 2000)

Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Selain itu krisis keuangan global saat ini menjadi salah satu bukti kegagalan paradigma pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan agar dapat diperbaharui. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya antara kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan antar daerah dalam kesediaan infrastruktur yang memadai dan antar sektor produksi dan seterusnya. (Huda N. d., 2017)

Pentingnya koordinasi kebijakan berkaitan dengan masih adanya beberapa permasalahan mendasar dalam perekonomian yang belum dapat diatasi dengan segera, seperti permasalahan struktural di sisi penawaran dan pembinaan UMKM. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah akan diprioritaskan pada upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan ekonomi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan perekonomian secara luas. Disamping koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi makroekonomi, sejumlah langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan investor luar negeri dan perangkat Indonesia, dukungan intermediasi perbankan, dan memperdalam sektor keuangan domestik. Kajian sektor-sektor ekonomi dan komoditas -komoditas unggulan melalui hasil survei maupun Kajian Ekonomi Regional (KER) juga terus dilakukan oleh Kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. (BI, 2009)

Permasalahan yang di hadapi negara berkembang khususnya di Indonesia, akan bisa terpecahkan melalui sinergi antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah sebagai mitra bisnis selaku penyedia dana atau permodalan bagi pelaku UMKM. Selain itu menurut pemikiran mazhab ekonomi Islam dalam kebijakan moneter menyatakan bahwa semakin tinggi nilai pajak (μ) terhadap aset produktif yang menganggur maka *velocity of money* (perputaran uang) akan meningkat, dengan demikian akan mengurangi permintaan uang untuk berjaga-jaga (disimpan) dan sekaligus akan meningkatkan permintaan untuk transaksi. Peningkatan uang yg digunakan untuk transaksi dan investasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Sistem bagi-hasil dalam transaksi syirkah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat ikut serta dalam perekonomian, agar tercipta pemerataan kesempatan kerja bagi semua orang. *Profit-sharing* atau *expected rate of profit* (harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi disektor riil), ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi. (Karim A. A., 2014) Artinya, pemanfaatan modal yang optimal di sektor riil sangat penting adanya dalam meningkatkan pendapatan nasional. Agar bisa mencapai pembangunan ekonomi Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-undang yang telah disahkan oleh presiden sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor riil untuk meningkatkan pembangunan Nasional. Dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kemudian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam UU bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu juga pemerintah harus memberikan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian pemerintah juga telah mengatur tentang kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Hal tersebut, tentu peran LKS sangat diutamakan karena sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam yang di praktekan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik itu berbentuk Bank maupun lembaga Non Bank.

Lebih lanjut dalam UU tahun 2008 tentang UMKM (pasal 5) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, yaitu: a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

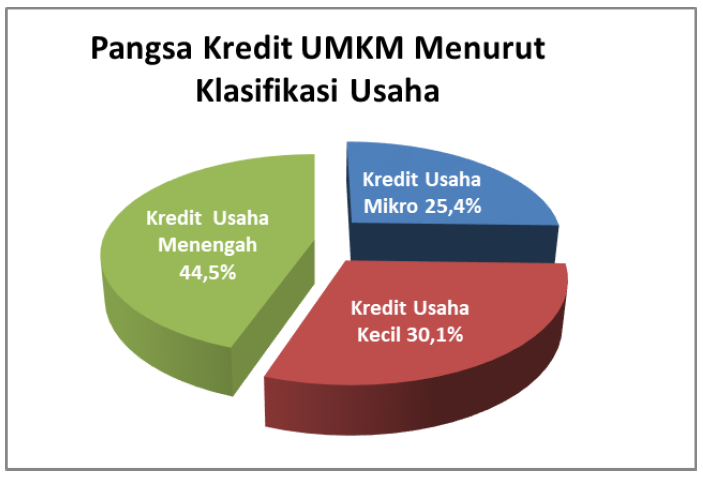
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegitan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatau barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat.

* Kewirausahaan dianggap sebagai jihad fii sabilillah (*strong efforts to do good things in the name of Allah*)
* Entrepreneur dianggap sebagai amal Sholeh (*good deeds*) karena kegiatan entrepreneurship menyediakan pendapatan kepada individu, menawarkan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan. Dimana kemiskinan adalah salah atu dari persoalan sosial ekonomi.
* Entrepreneurship juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melakukan kebajikan melalui entrepreneurship, akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dan individu serta akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan tuhannya.
* Meningkatkan kualitas hidup, hidup lebih nyaman menguatkan kedudukan *socio-econimic* negara, agama dan bangsa.
* Membantu mengembangkan *khairun ummah* (masyarakat terbaik, yang produktif dan maju (*progreessive*)

Berdasarkan laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan IV 2018 bahwa baki debet kredit UMKM mencapai Rp1.086 triliun, tumbuh 9,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut naik dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%, yoy). Sementara itu, pertumbuhan total kredit perbankan mencapai 12,0% (yoy), turun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (12,9%, yoy).

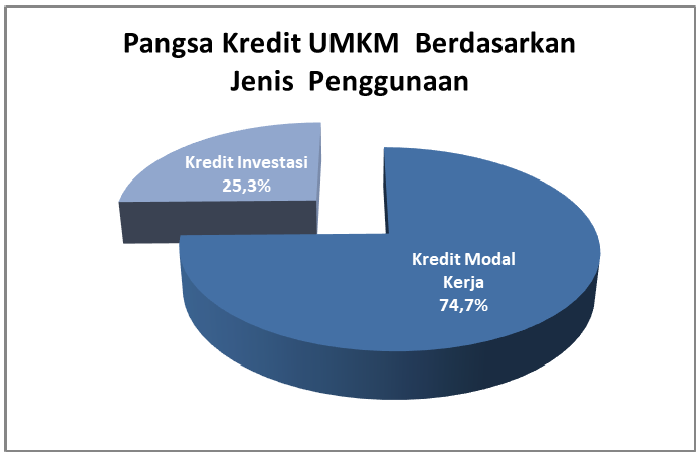
Peningkatan kredit pada triwulan IV 2018 terjadi pada klasifikasi usaha kredit usaha menengah sebesar 7,51% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,5% (yoy). Sedangkan usaha kredit mikro dan kecil melambat masing-masing sebesar 12,7% (yoy) dan 10,4% (yoy) di bandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,6% (yoy) dan 10,8% (yoy).

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada periode laporan sebesar 19,9%, naik dibandingkan pangsa triwulan sebelumnya sebesar 19,6%. Sedangkan menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha menengah yaitu 44,5% dan selebihnya kepada kredit usaha kecil 30,1% dan kredit usaha mikro sebesar 25,4%.



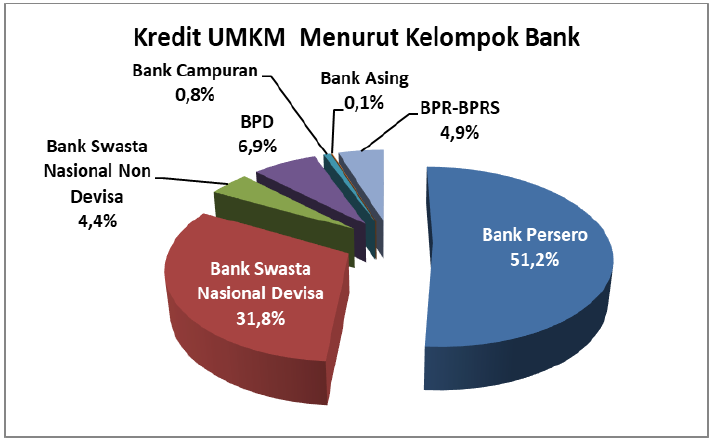
**Gambar.1**. Pangsa Kredit UMKM Menurut Klasifikasi Usaha

Menurut jenis penggunaan, kredit UMKM terutama disalurkan untuk membiayai kredit modal kerja sebesar 74,7%, sedangkan untuk kredit investasi tercatat 25,3%.



**Gambar.2**. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

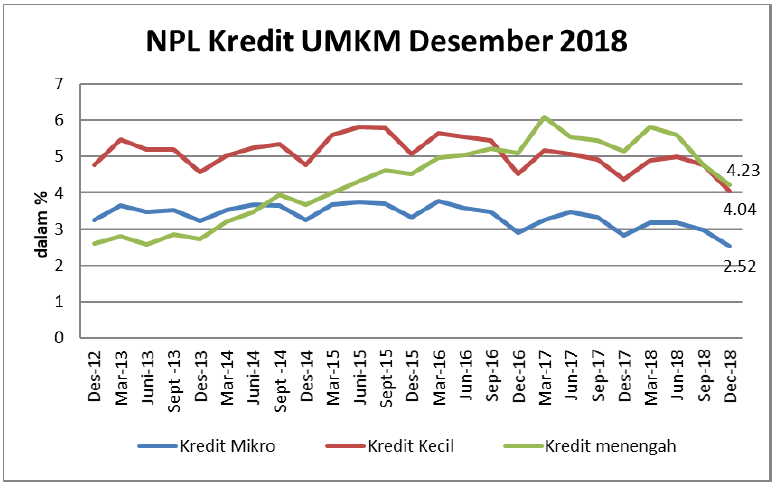
Sedangkan menurut kelompok bank, kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Persero sebanyak Rp555,6 triliun (51,2%), diikuti kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar Rp345,0 triliun (31,8%), BPD Rp75,2 triliun (6,9%), BPR/BPRS Rp53,4 triliun (4,9%), Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp47,3 triliun (4,4%), Bank Campuran Rp8,6 triliun (0,8%), serta Bank Asing Rp840,1 triliun (0,1%). Dari data di atas menunjukan bahwa masih kurangnya peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana terhadap UMKM. Padahal LKS sendiri sangat erat kaitannya dengan sektor riil.



**Gambar.3**. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan eceran, Industri Pengolahan, dan sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masing-masing sebesar 50,1%, 9,6% dan 9,2%.

Kinerja (*Non Performing Loan*) kredit UMKM secara keseluruhan pada akhir triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,74% menurun dibandingkan rasio NPL kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 4,31%. NPL tertinggi terjadi pada kredit usaha menengah sebesar 4,23% dan terendah terjadi pada kredit usaha mikro sebesar 2,52%. Sedangkan NPL kredit usaha kecil tercatat sebesar 4,04%.



**Gambar.4**. NPL Kredit UMKM Desember 2018

Berdasarkan dari data pertumbuhan dan perkembangan serta peran Bank sebagai penyedia dana (modal) bagi pelaku UMKM di atas, sehingga diperlukan peran lembaga keuangan syariah sebagai stakeholder dan partnership dalam mendorong perekonomian pada sektor riil melalui UMKM. Lembaga keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Pembiayaan kepada UMKM ini tidak lepas juga dari pengaruh Grameen Bank sebelumnya, yang telah berdiri sejak medio 1970-an. Pembiayaan lembaga keuangan syarah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun lembaga keuangan (perbankan). (Muheramtohadi, 2017) Karena peran LKS sebagai penupang roda UMKM, yang selanjutnya memberikan dampak positif terhadap ekonomi pembangunan Nasional khususnya di Indonesia yang notabine sebagai negara berkembang menuju negara maju.

Dewasa ini, perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, makin banyaknya variasi produk, *awareness* dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat makin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif.

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset keuangan syariah meningkat, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar, yang terdiri dari:

1. Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengannilai sebesar Rp365,65 triliun;
2. Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59%dengan nilai sebesar Rp432,25 triliun;
3. Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilaisebesar Rp14,91 triliun; dan
4. IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah,lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61%dengan nilai sebesar Rp85,48 triliun.

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syariah tercatat meningkat 16,41% atau sebesar Rp35,9 triliun menjadi Rp254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. (OJK, 2017) Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM. (Jenia, 2017)

Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada realisasinya perlu membangkitkan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan mayoritas utama pekerjaannya. Pendekatan industrialisasi (kapitalis) yang diterapkan selama ini lebih mengedepankan pada padat modal yang tidak memihak kepada masyarakat banyak. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mencerminkan kemampuan dan keahlian masyarakat. (Primiana, 2009)

Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju sebagaimana tergambar dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yaitu sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi milenium oleh 198 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. Serta Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia pada 2025 dengan pendapatan perkapita USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total PDB antara USD 4,0-4,5 triliun. (Huda N. d., 2017)

Berdasarkan data dari Kemenrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagai tambahan dalam perannya dalam perkembangan ekonomi dan ketengakerjaan, UMKM juga berperan dalam perkembangan distribusi hasil. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PBD) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). UKM juga telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika krisis yang melanda pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang dapat kuat bertahan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa setelah krisis ekonomi 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM bertambah, bahkan menyerap 85 juta hingga 107 juta pekerja hingga tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit. Dari jumlah ini, UMKM menduduki jumlah 56,534,592 unit atau sebanyak 99,99%, selebihnya sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah pengusaha besar. Contoh dari kebijakan UMKM di pemerintahan kabupaten Blora terkair dengan peran dari UMKM terhadap pembangunan, secara khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kotamadya diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha dan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa langkah dan proses yang harus dilewati. Sehingga dibutuhkan keseriusan seluruh pihak yang terkait dan ikatan kerjasama antar daerah. Aplikasi populisme ekonomi dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan dari masyarakat. Bentuk nyata dari populisme ekonomi adalah dalam bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal namun juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika didukung oleh penggunaan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu dan tempat. (Putra, 2016)

Oleh sebab itu, perlunya dukungan pemerintah untuk ekspansi Islamisasi sistem keuangan, yaitu dengan sistem ummah bahwa tidak adanya suku bunga dan diganti *expected rate of profit* dalam sistem pembiayaan. Agar maksimalisasi sumber dana kepada usaha yang produktif. (Karim A. A., 2014) Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pengbangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketenteuan syariah, baik dalam bentuk Firman Tuhan, sabda Rasulullah, Ijma, Qiyas maupun Ijtihad para ulama fiqih. (Purwana, 2013)

Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia dapat dilihat pada gambar.5 berikut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau

Entrepreneurship

Lembaga

Keuangan

Syariah (LKS)

**Problem NSB:**

Pengangguran

Kemiskinan

Pendidikan

Kriminal

Daya beli

Inflasi

Kesehatan

Gap

Jumlah penduduk

Dll.

**Solusi Strategis Pembangunan Ekonomi di Indonesia**

**SOLUSI**

ZIS

**Gambar.5.** Peran LKS terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Mengatasi Permasalahan NSB

*Sumber: Diolah dari berbagai teori*

Dari gambar.5. di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran sebagai intermediari baik melakukan kerjasama (*syirkah*) maupun penyedia produk-produk pembiayaan (*financing*) dengan menggunakan instrumen keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Kemudian para pelaku UMKM akan bergerak pada sektor riil dalam memproduksi barang ataupun jasa. Di sinilah peran utama UMKM agar dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) khususnya di Indonesia.

Permasalahan tingginya angka pengangguran akan bisa diatasi dengan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan melalui lapangan kerja UMKM. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka, maka pengangguran akan menurun. Apabila jumlah produsen dan investasi meningkat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga penggunaan tenaga kerja meningkat. Angka kemiskinan pun bisa ditekan jika angka pengangguran berkurang dikarenakan masyarakat sudah memiliki pendapatan (upah minimum) dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal. Karena pada umunya, orang berperilaku kriminal disebabkan oleh faktor ekonomi. Dengan adanya sumber penghasilan tersebut bisa dimanfaatkan pula untuk menunjang kualitas pendidikan (SDM), dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menimbulkan efek terhadap tingkat kesejahteraan.

Selain itu, masalah kesehatan akan bisa teratasi jika masyarakat mapan dalam hal ekonomi. Begitu pula masalah kesenjangan (gap) sosial ekonomi harus dikesampingkan, setiap orang memiliki hak kesempatan kerja yang sama. Orang kaya bisa melakukan kerjasama dengan yang miskin (*syirkah*), agar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak semakin melebar.

Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya. (HR, 2009)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi harus diikuti dengan pertumbuhan sektor industri (sektor riil), agar tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan akibat dari konsumsi masyarakat yang tinggi, yang memaksa pemerintah harus melakukan impor barang. Justru sebaliknya, bahwa mendorong UMKM untuk lebih maju dan berkembang agar kapasitas produksi dalam negeri (PDB) meningkat sehingga dapat melakukan ekspor barang dan jasa yang bermuara pada harga dalam negeri relatif rendah (murah) dan bisa menekan angka inflasi sekaligus menjadikan nilai tukar rupiah (kurs) menguat (apresiasi) terhadap mata uang asing. Dalam ekonomi makro, kenaikan *output* (produksi barang dan jasa) suatu negara akan menyebabkan nilai tukar mata uangnya mengalami apresiasi terhadap mata uang asing, sedangkan jika terjadi kenaikan *output* negara asing akan menyebabkan nilai tukar mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan *output* (produksi barang dan jasa), maka tingkat harga akan mengalami penurunan, yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi. Perekonomian yang baik, akan mendorong negara asing untuk berinvestasi. (Karim A. A., 2014) Semua itu harus mementingkan asas keadilan sosial sebagaimana terdapat pada pancasila yaitu sila ke-5. Serta tidak mengesampingkan berdemensi sosial dengan pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah dan hukum waris. (Huda N. d., 2017)

Dengan demikian, perlunya sinergi antara pemerintah dengan institusi lembaga keuangan syariah dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM yang notabine bergerak pada sektor riil demi terciptanya pertumbuhan ekonomi pembangunan di Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju seperti: Jepang, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan lain-lain.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting sebagai intermediari.
2. Lembaga keuangan syariah harus memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan pagi pelaku UMKM.
3. Sistem keuangan syariah telah teruji mampu bertahan ditengah krisis keuangan yang pernah melanda di Indonesia.
4. Kerjasama berkesinambungan pemerintah dengan lembaga intermediari serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil.
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu mengatasi permasalahan yang dihadapai negara sedang berkembang (NSB) jika dimaksimalkan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aedy, Hasan, (2011), *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam – Sebuah Studi Komparasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Beik, Irfan Syauqi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press

Bank Dunia (World Bank).

BI, (. I. (2009). *Ringkasan Eksekutif Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional.* Jakarta.

BI.Perkembangan Baki Debet Kredit Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) Perbankan.

Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi.* Jakarta: Gema Insani Press.

Damanhuri, Didin S., (2010), *Ekonomi Politik dan Pembangunan – Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang,* IPB Press, Bogor.

Ekonomi, (. W. (2019, Agustus). UMKM Punya Peran Penting bagi Perekonomian Indonesia dalam https://www.wartaekonomi.co.id/read239503/umkm-punya-peran-penting-bagi-perekonomian-indonesia.html.

Ervani, E. (2011). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1980.I –2004.IV. *Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.7, No.2*, 223-232.

Hariyono. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HR, M. N. (2009). *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian.* Surabaya: Amanah Pustaka.

Huda, N. d. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Kencana.

Jenia. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *AL Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember*.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kresno, B. (2018, Juni). Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah. Dalam https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah. Diakses pada 09 September 2019.

Laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan IV 2018.

Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 65-77.

Mulyani, E. (n.d.). Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Berkemb. In *Modul 1.*

Narbuko, C. d. (2007). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Angkasa.

OJK, (. J. (2017). Road Map Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.

Primiana, I. (2009). *Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan dalam Menumbuhkan UMKM dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri.* Bandung: Alfabeta.

Purwana, A. E. (2013). Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica, Vol.10/No.1/Jan.-Juni*.

Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 5(2): 40-52.

Republika. (2011, September). Perbankan Syariah Tahan Banting Hadapi Krisis Global. Dalam https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/ls3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global. Diakses tanggal 06 Desember 2019.

Rini, H. Z. ( 2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Lawean. *Academica : Jurnal of Multidiciplinary Studies Vol.1 No.1 Januari-Juni*.

Todaro, M. P. (2000). *Economics Development.* New York: Pearson Education Limited.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.